PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS)

KOTA BIMA TAHUN 2022

BADAN PANGAN NASIONAL

DAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan
Jl. Gajah Mada No. 92 Penato'i Raba Kota Bima
Nusa Tenggara Barat

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS* – FSVA)
KOTA BIMA
TAHUN 2022

Pengarah:
Ichwanul Muslimin, SP.,MM
(Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima)

Penanggung jawab:
Masita, SP
(Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerentanan Pangan)

Tim Penyusun:
Ardiansyah, S.Pt
Abdul Najir, S.Pt, MM
Nurramdani, S.ST Gz
M. Nur Setiawan, SE
Arif Budiman, ST.,M.Si
Repta Warman
Sulastri Dewi, SE
Ardiansyah, S.Kom
Julkarnain, S.Kom
M. Tayeb Ismail, S.Sos
M. Darwis, SP

Kerjasama :

BADAN PANGAN NASIONAL

Dengan

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA

SAMBUTAN

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Segala puji hanya milik Allah, semoga rahmat dan hidayah Allah selalu tercurah untuk kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara. Sholawat dan Salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food security and Vulnerability Atlas /FSVA)" Kota Bima tahun 2022 karena buku FSVA merupakan dokumen yang berisi informasi tentang kelurahan yang tahan dan rentan terhadap pangan dan gizi, Saya berharap buku ini menjadi salah satu dokumen acuan dalam perencanaan program dan kegiatan bagi seluruh OPD dalam menentukan arah dan kebijakannya dalam memperbaiki, memperkuat dan meningkatkan pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima.

Komitmen pemerintah Kota Bima adalah menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas RPJMD, sehingga kebijakan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, infrastruktur serta jasa diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kota Bima. Saya selaku Walikota Bima menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun atas terbitnya buku Peta FSVA ini, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kota Bima.

"Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq, Wassalamu'alikum Warohmatullahi Wabarokatuh".

Kota Bima, November 2022

WALIKOTA BIMA

H. MUHAMMAD LUTFI, SE

KATA PENGANTAR

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang diperbaharui setiap tahunnya. FSVA menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan sebagai salah satu dasar dalam menyusun perencanaan program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi termasuk upaya untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Saya berharap dengan penyusunan FSVA di Kota Bima menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi dan fakta yang ada, karena dengan FSVA yang akurat, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan agar kejadian rawan pangan dapat di deteksi lebih dini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,

Ichwanul Muslimin, SP.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19720229 200501 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan dan tahan terhadap kerawanan pangan berdasarkan 6 indikator.

3. FSVA Kota Bima merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah Kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kelurahan. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kota Bima.

4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap total jumlah penduduk; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

5. kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA Kota Bima Tahun 2022 menunjukkan bahwa kelurahan rentan pangan Prioritas 2-3 sebanyak 12 kelurahan dari 41 kelurahan (31,71%) yang terdiri dari 5 kelurahan (12,20%) Prioritas 2; 7 kelurahan (17,07%) Prioritas 3. Kelurahan prioritas 2 tersebar 1 kelurahan di Kecamatan Asakota; 2 kelurahan di Kecamatan Rasanae Timur dan 2 kelurahan di Kecamatan Raba. Kelurahan prioritas 3 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Rasanae Barat; 1 Kelurahan di Kecamatan Mpunda; 3 kelurahan di Kecamatan Rasanae Timur; 1 kelurahan di Kecamatan Raba dan 1 kelurahan di Kecamatan Raba.

7. Karakteristik kelurahan rentan pangan di Kota Bima ditandai dengan (1) Sarana Pangan yang belum memadai jumlahnya, (2) Jumlah Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah masih cukup tinggi, (3) Jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai, dan (4) Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih yang masih cukup tinggi.

8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan di Kota bima diarahkan pada kegiatan :
   a. Penyediaan sarana pangan yang memadai.
   b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, optimasi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan listrik), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah
   c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
   d. Penyediaan dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan.

DAFTAR ISI

	SAMBUTAN WALIKOTA BIMA	**iii**
	KATA PENGANTAR	**iv**
	RINGKASAN EKSEKUTIF	**v**
	DAFTAR ISI	**vii**
	DAFTAR TABEL	**viii**
	DAFTAR LAMPIRAN	**ix**
I.	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	4
	1.3. Metodologi	7
2.	**KETERSEDIAAN PANGAN**	**12**
	2.1. Lahan Pertanian	12
	2.2. Produksi Pangan	14
	2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi	16
	2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	17
3.	**AKSES PANGAN**	**21**
	3.1. Penduduk Dengan Kesejahteraan Terendah	21
	3.2. Akses Transportasi	23
	3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan	24
4.	**PEMANFAATAN PANGAN**	**27**
	4.1. Akses Terhadap Air Bersih	27
	4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	28
	4.3. Dampak Dari Status Kesehatan	29
	4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	32
5.	**KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT**	**37**
	5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	37
	5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	39
6.	**REKOMENDASI KEBIJAKAN**	**42**
7.	**LAMPIRAN**	**44**

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Indikator FSVA Kota Bima 2022 7
2. Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu 10
3. Tabel 2.1 Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap total lahan berdasarkan prioritas 13
4. Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton) 14
5. Tabel 2.3 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton) 15
6. Tabel 2.4. Data Luas Lahan Sawah yang Beralih Fungsi di Kota Bima 16
7. Tabel 2.4. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas 17
8. Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Bima 21
9. Tabel 3.2 Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas 22
10. Tabel 4.1 Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas 27
11. Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas 29
12. Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2017-2021 30
13. Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas 37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Data Analisis FSVA Kota Bima Tahun 2022 44
2. Lampiran 2. Hasil Analisis FSVA Kota Bima Tahun 2022 45
3. Lampiran 3. Jumlah dan Persentase Prioritas Komposit 46
4. Lampiran 4. Faktor Berpengaruh Terhadap Rawan Pangan 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Bima terdiri dari 5 kecamatan dan 41 kelurahan dengan jumlah penduduk Tahun 2021 sebesar 179.822 jiwa (BPS Kota Bima). Secara geografis Kota Bima terletak di antara 118° 41'- 118° 48' Bujur Timur dan antara 8° 20'- 8°30' Lintang Selatan. Kota Bima di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bima yang memiliki wilayah daratan seluas 222,25 km^2 atau 22.225 Ha. Secara klimatologis, Kota Bima memiliki pola tipe curah hujan tipe monsunal. Curah hujan pola monsun dicirikan oleh tipe curah hujan yang bersifat unimodial (satu puncak musim hujan) dimana pada bulan Juni, Juli dan Agustus terjadi musim kering. Sedangkan untuk bulan Desember, Januari dan Februari merupakan bulan basah. Sisa enam bulan lainnya merupakan periode peralihan atau pancaroba (tiga bulan peralihan musim kemarau ke musim hujan dan tiga bulan peralihan musim hujan ke musim kemarau).

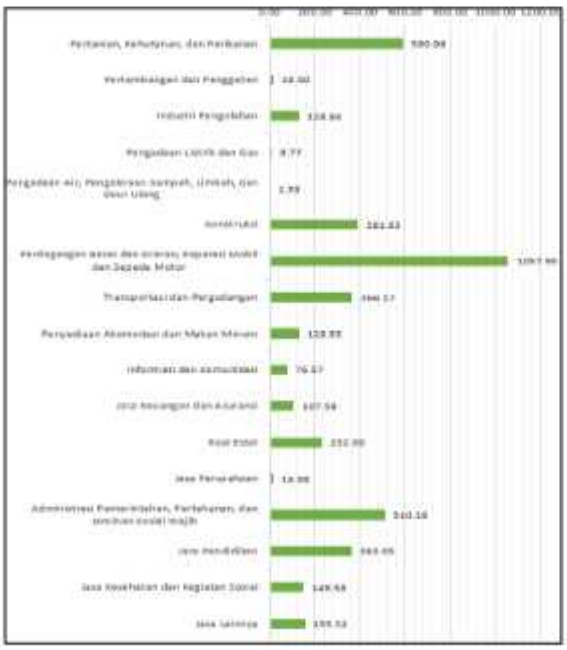

Perekonomian Kota Bima tergantung pada sektor jasa perdagangan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 peranannya dari 24,64% turun menjadi 24,60%. Penurunan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor jasa mengalami penurunan peranan. Selain sektor jasa perdagangan, sektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap PDRB Kota Bima adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan namun sektor ini mengalami penurunan yaitu dari

14,03% menjadi 13,74%; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari 11,93% menjadi 11,86%; dan sektor konstruksi dari 8,61% naik menjadi 9,11%. Sementara sektor lainnya mengalami peningkatan dan penurunan. Sektor transportasi pergudangan menunjukkan peranan sebesar 8,51%, sektor jasa pendidikan sebesar 8,44%, sektor Real Estate sebesar 5,39%, sektor jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,48%, dan sektor jasa lainnya sebesar 3,61%.

Lapangan Usaha/*Industry*		2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	13,64	13,59	13,38	14,03	13,74
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	0,40	0,39	0,40	0,39	0,38
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	3,07	3,01	2,98	3,08	3,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi/*Construction*	9,10	9,21	9,42	8,61	9,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	24,13	24,49	25,13	24,64	24,60
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	10,22	10,17	10,22	8,46	8,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	3,11	3,12	3,09	3,05	3,01
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	1,50	1,50	1,48	1,75	1,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	2,44	2,46	2,35	2,49	2,50

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas* - FIA) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kelurahan.

Pengembangan FSVA tingkat desa/kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada Tahun 2012 FAO[1] mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada Tahun 2013[2] juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi

[1] Disampaikan pada Commitee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia
[2] Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

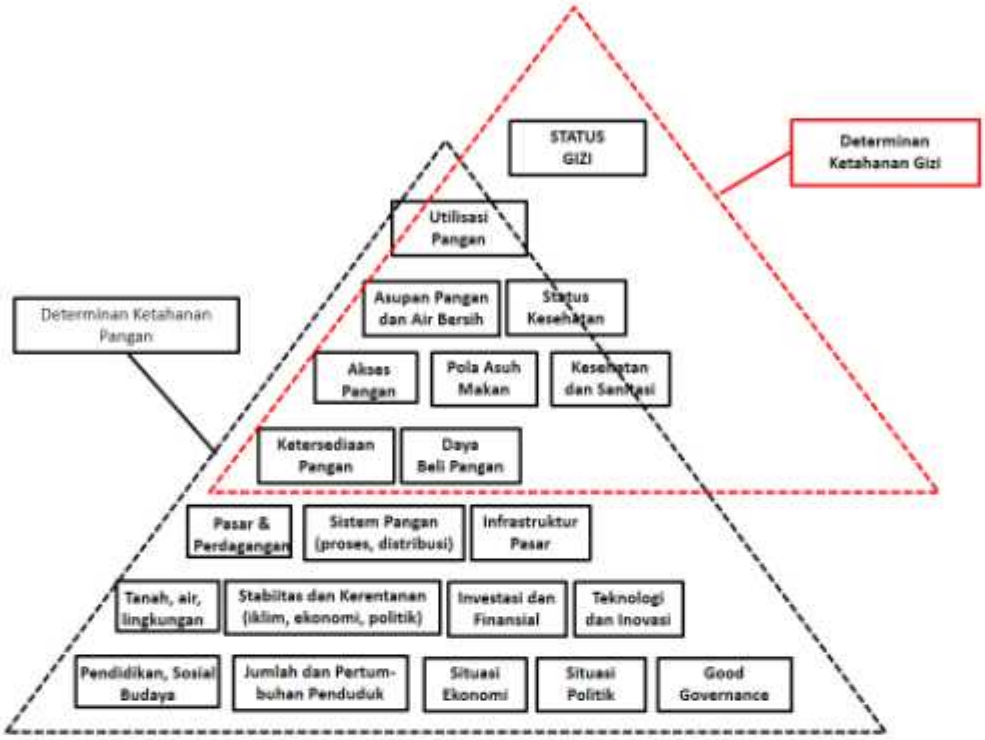

Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan

mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten/kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh kelurahan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kota Bima terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kota Bima 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan jumlah penduduk	Pusdatin-Kementan 2019 diolah BKP, BPS, Dinas Pertanian, Dinas PUPR dan Dukcapil Kota Bima 2021.
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	Potensi Kelurahan 2021 diolah BKP, BPS dan Dinas Koperindag 2021
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dibandingkan jumlah penduduk keluarahan	DTKS Kemensos, BPS dan Dinas Sosial Kota Bima 2021

Indikator	Definisi	Sumber Data
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara dengan kriteria: (1) dapat dilalui sepanjang tahun; (2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.); (3) dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun.	Potensi Kelurahan 2021 dioleh BKP, BPS dan Dinas PUPR Kota Bima 2021.
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di kelurahan	BPS, Dinas Kesehatan Kota Bima dan Simatik Kelurahan 2021
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: 1) tenaga medis; (2) tenaga keperawatan; (3) tenaga kebidanan; dan (4) tenaga gizi, dibandingkan dengan kepadatan penduduk kelurahan	BPS, Dinas Kesehatan, Simatik kelurahan 2021

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)

b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^{9} a_i X_{ij} \quad \text{..... (1)}$$

Dimana :

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		**1/3**
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6
4.	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		**1/3**
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6
Sub Total		**1/3**

c. Mengelompokan kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^{9} a_i C_{ij} \quad \text{..... (2)}$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari pada kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasikan sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak

berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis komposit kemudian divisualisasikan ke dalam sebuah bentuk peta. Selain itu, indikator individu juga divisualisasikan ke dalam bentuk peta berdasarkan range indikatornya, sehingga akan dihasilkan tujuh peta yang terdiri dari satu peta komposit dan enam peta indikator individu. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gradasi hijau menggambarkan variasi ketahanan pangan. Warna yang semakin tua menunjukkan status yang lebih tinggi dari situasi ketahanan atau kerentanan pangan. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan software Quantum-GIS.

BAB 2
KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian (sawah, ladang, pekarangan, kebun, dan lainnya) penghasil pangan (produktif) dengan jumlah penduduk. Lahan pertanian memiliki nilai manfaat penggunaan (*use value*) yang di dapat dari hasil kegiatan usaha tani yang dilakukan pada lahan tersebut.

Rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Luas lahan pertanian dapat mengacu pada luasan tanam di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari sebanyak 41 kelurahan di Kota Bima, tidak ada kelurahan masuk dalam prioritas 1 (0%), sebanyak 12 kelurahan prioritas 2 (29,27%) dan 6 kelurahan prioritas 3 (14,63%).

Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 2-3 paling banyak tersebar di Kecamatan Mpunda sebanyak 7 kelurahan, yaitu Mande, Sadia, Manggemaci, Monggonae, Lewirato, Penatoi dan Santi. Sementara di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 5 kelurahan, yaitu Paruga, Tanjung, Sarae, Nae dan Pane. Sedangkan di Kecamatan Raba sebanyak 5 kelurahan yaitu Rabangodu Selatan, Rabangodu Utara, Penaraga, Rabadompu Timur dan Rabadompu Barat. Dan di Kecamatan Asakota sebayak 1 kelurahan yaitu Melayu.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap total lahan berdasarkan prioritas.

Prioritas	Rasio Lahan Pertanian	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	<0.0043	0	00,00
2	0.0043	12	29,27
3	0.0110	6	14,63
4	0.0170	2	4,88
5	0.0489	1	2,44
6	>0.0490	20	48,78

Grafik

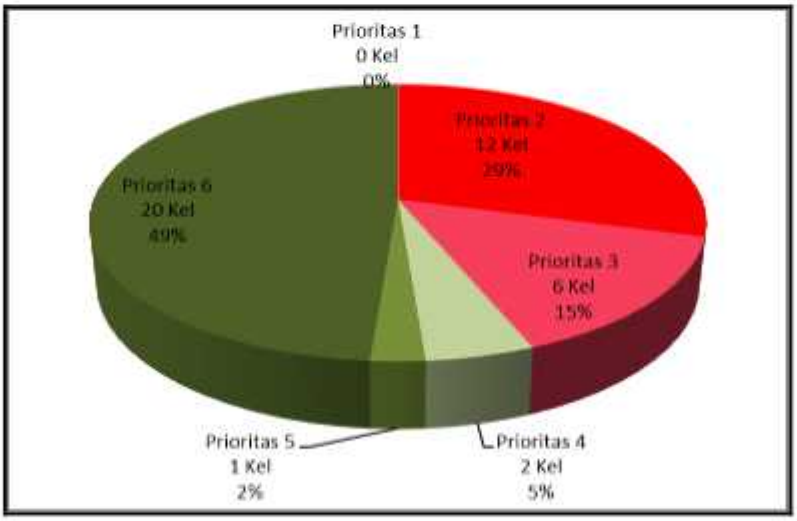

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kota Bima telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 13,74% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima pada Tahun 2021 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kota Bima yang menyumbang hampir 98,39% dari total produksi serealia Kota Bima.

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kota Bima mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan penurunan produktivitas. Produksi padi menurun selama 5 Tahun, yaitu dari produksi 34.265 ton Tahun 2017 menjadi 11.564 ton pada Tahun 2021. Sementara produksi jagung mengalami peningkatan dari 15.515 ton pada Tahun 2017 menjadi 48.152 ton pada Tahun 2021.

Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton)

Serealia	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata 5 Tahun
Padi	34.265	31.269	12.948	13.834	11.564	20.776
Jagung	15.515	30.307	62.205	44.177	48.152	40.071
Ubi Kayu	2.032	30	1.570	0	1.325	991
Ubi Jalar	26	0	0	0	0	5

Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2017-2021, BPS 2022 dan NTB Satu Data

Grafik

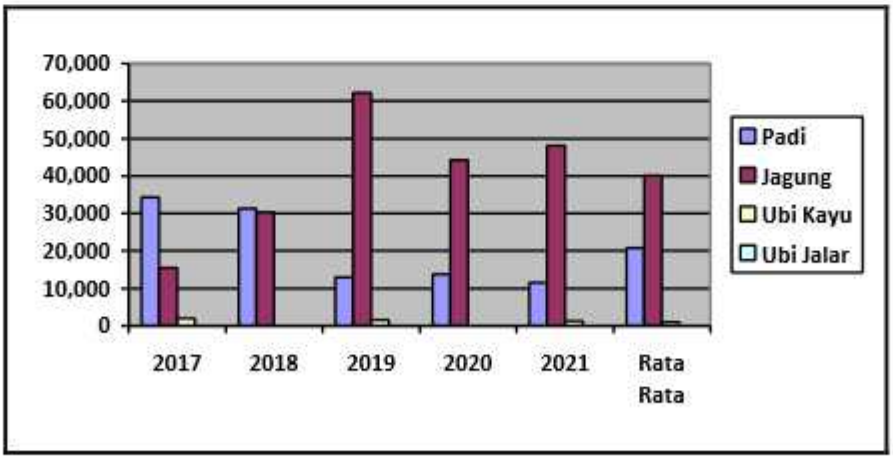

Tahun 2021, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 61.041 ton, terdiri dari 11.564 ton padi, 48.152 ton jagung dan 1.325 ton ubi kayu.

Sedangkan menurut data dari Dinas Pertanian Kota Bima Produksi padi menurun selama 5 Tahun, yaitu dari produksi sebesar 34.263 ton Tahun 2017 menjadi sebesar 25.301 ton pada Tahun 2021.

Tabel 2.3 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton)

Serealia	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata 5 Tahun
Padi	34.263	31.269	27.870	28.600	25.301	29.461
Jagung	15.513	30.307	62.205	44.222	43.044	39.058
Ubi Kayu	2.032	30	1.570	0	0	726
Ubi Jalar	26	0	0	0	0	5

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022.

Grafik

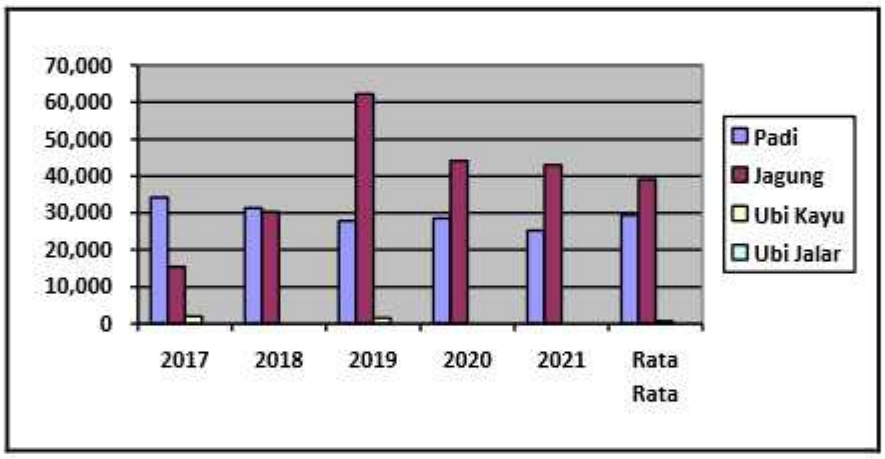

Namun dari kedua sumber data diatas menunjukkan bahwa jumlah produksi bahan serelia dan umbi-umbian mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini dapat disebabkan oleh luas lahan pertanian yang ada di Kota Bima terus mengalami penurunan sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.

Tabel 2.4. Data Luas Lahan Sawah yang Beralih Fungsi di Kota Bima.

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah Eksisting (Ha)		Luas Lahan Yg Beralih Fungsi (Ha)	Lokasi Yang Berpotensi Akan Terjadi Alih Fungsi	IP Lahan Yang Beralih Fungsi	Provitas Dari Lahan Yang Beralih Fungsi (Kw)	Prod. Yang Hilang Dari Lahan Yg Beralih Fungsi (Ton)
		2019	2020					
1	Asakota	283	276	7,0	Asakota	200	57,68	40,376
2	Rasanae Barat	5	5	- ,0	Rasanae Barat			- ,0
3	Mpunda	286	282	4,0	Mpunda	200	54,94	21,976
4	Raba	698	686	12,0	Raba	200	55,85	67,020
5	Rasanae Timur	1.112	1.112	- ,0	Rasanae Timur			- ,0
Total Kota Bima		**2.384**	**2.361**	**23**				**129,372**

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022.

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut. Rendahnya kualitas infrastruktur; terbatasnya akses terhadap aset produktif, terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi produktif merupakan penyebab kemiskinan dan kerawanan pangan.

Indikator sarana dan prasarana penyedia pangan digunakan sebagai indikator yang melengkapi indikator sebelumnya karena bisa jadi suatu wilayah kelurahan tidak memiliki potensi untuk memproduksi pangan sendiri, namun kelurahan tersebut memiliki sarana dan prasarana penyedia pangan sehingga ketersediaan pangan di kelurahan tersebut masih dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dari 41 kelurahan di Kota Bima, 8 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (19,51%), 8 kelurahan prioritas 2 (19,81%) dan 4 kelurahan prioritas 3 (9,76%).

Sebagian besar berada di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 7 kelurahan yaitu : Lampe, Dodu, Nungga, Kumbe, Oi Fo'o, Kodo dan Lelamase. Kemudian di Kecamatan Mpunda sebanyak 6 kelurahan yaitu Sambinae, Sadia, Manggemaci, Lewirato, Penatoi

dan Santi. di Kecamatan Raba sebanyak 6 kelurahan yaitu Nitu, Rontu, Rabadompu Timur, Kendo, Penanae dan Ntobo. Dan di Kecamatan Asakota sebanyak 1 kelurahan yaitu Jatibaru Timur.

Tabel 2.4. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	1	<0,0328	8	19,51
2	2	0,0328	8	19,51
3	3	0,0467	4	9,76
4	4	0,0628	2	4,88
5	5	0,0769	4	9,76
6	6	0,0964	15	36,59

Grafik

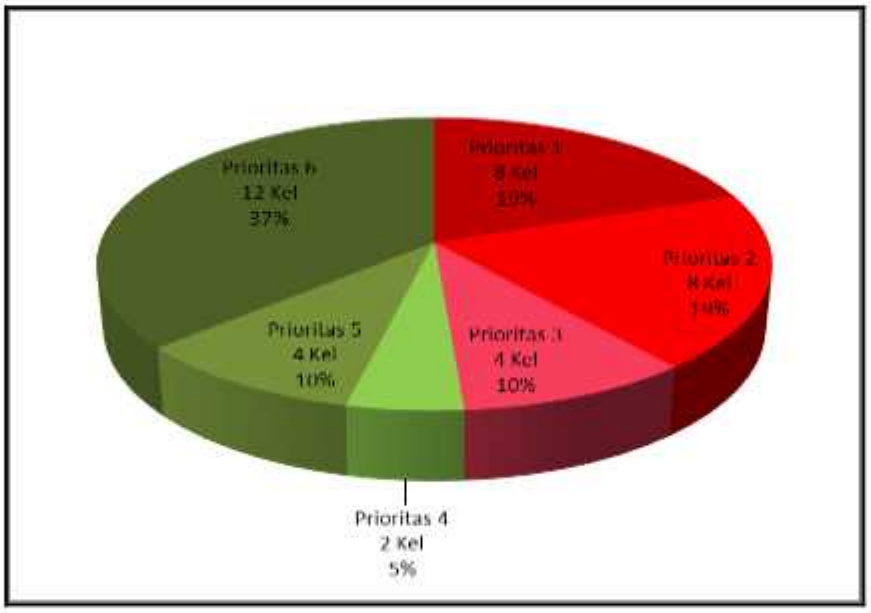

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima dari Tahun 2017-2021 mencapai 0,76% per Tahun, sementara pertumbuhan produksi padi -16,41% dan jagung 8,26%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kota Bima adalah sebesar 0,5 Ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan jumlah penduduk kota bima adalah sebesar 37,03%. Sedangkan rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 9,53%, hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Kebijakan Kota Bima mengenai ketersediaan pangan bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) Perluasan areal pertanian; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani dan (v) penyediaan sarana pangan.

Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

(i) Peningkatan produktivitas
   a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
   b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
   c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
   d. Pengelolaan air
   e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian

(ii) Perluasan areal pertanian.
   a. Perluasan areal dalam mendukung tanaman pangan, holtikultura dan peternakan
   b. Optimasi lahan
   c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Kelurahan.
   d. Pembangunan sumur pompa (irigasi tanah dangkal dan Irigasi tanah dalam) dan check dam serta embung

(iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
   a. Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
   b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

(iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
   a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
   b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
   c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
   d. Pemasaran produk pertanian, misalnya melalui Toko Tani Indonesia (TTI), Mitra Tani Indonesia dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

(v) Penyediaan sarana pangan melalui pemberian bantuan sarana/tempat usaha dan modal usaha.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
BERDASARKAN RASIO LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
KOTA BIMA
TAHUN 2022

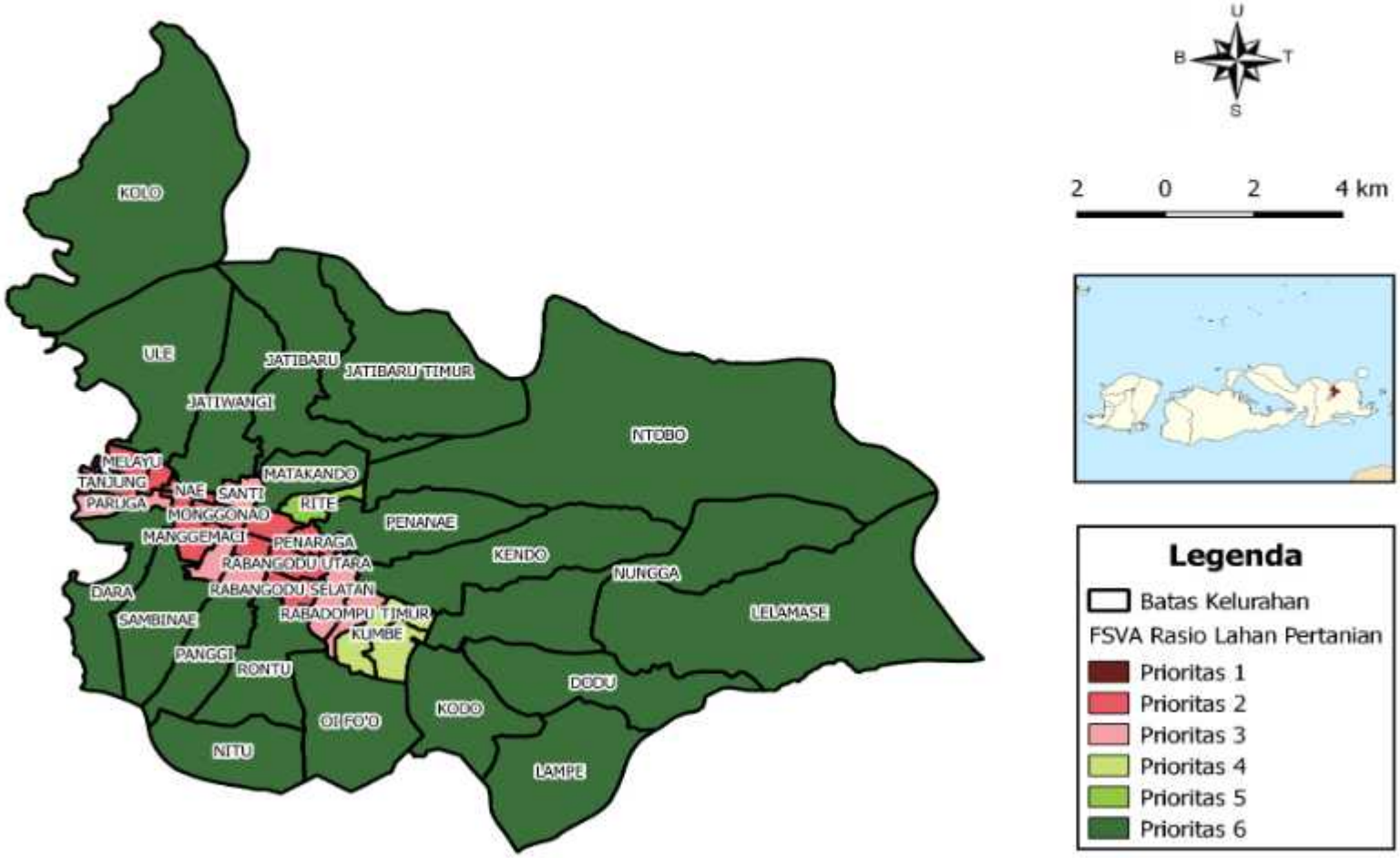

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
BERDASARKAN RASIO JUMLAH SARANA PANGAN TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA
KOTA BIMA
TAHUN 2022

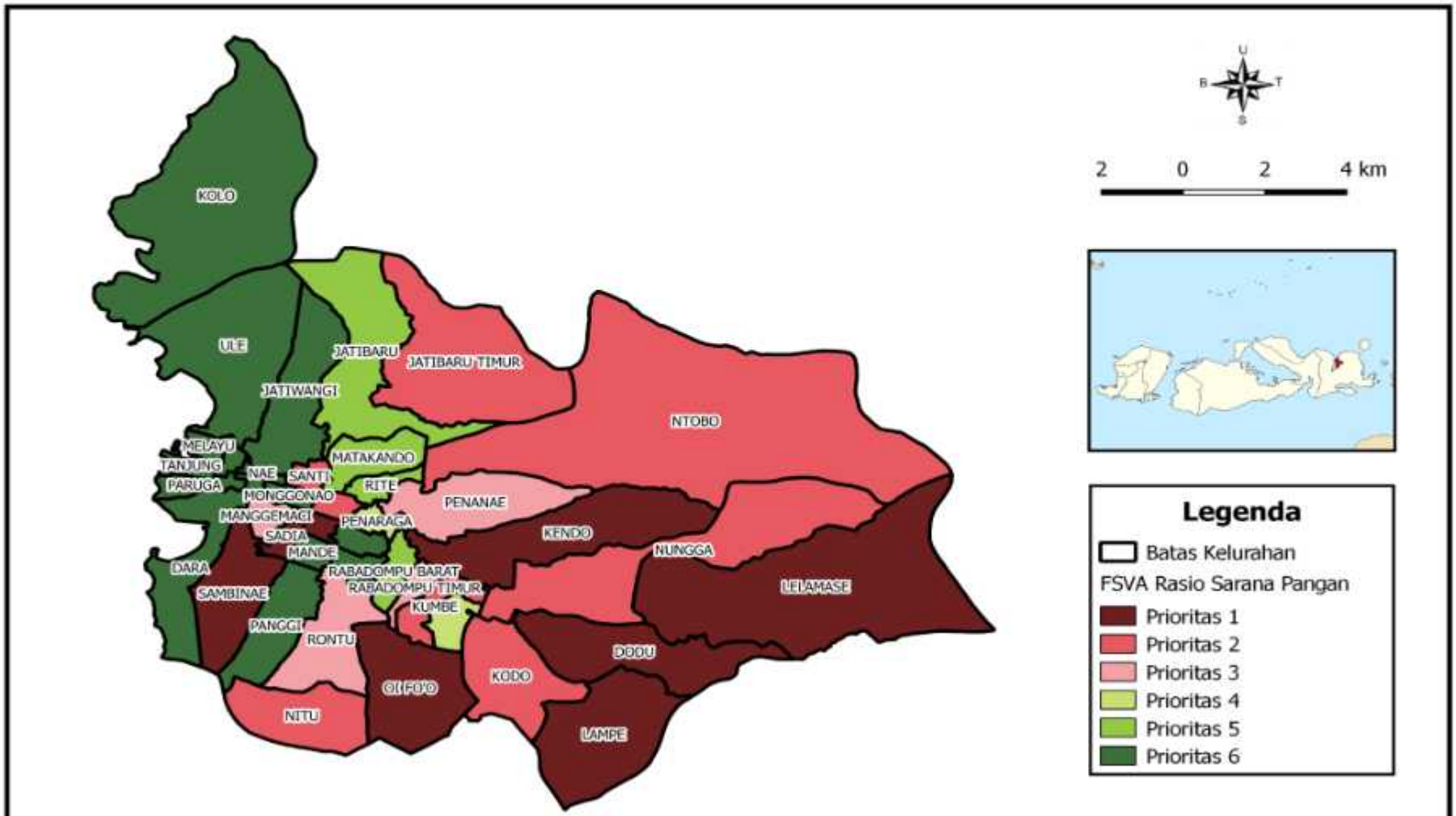

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kota Bima, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan; dan (2) kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Bima. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Bima terus mengalami penurunan dari 9,27% (15.360 jiwa) pada Tahun 2017 menjadi 8,35% (14.660 jiwa) pada Tahun 2020, namun pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 8,88% (16.220 jiwa).

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Bima

Keterangan	Tahun (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin	9,27	8,79	8,60	8,35	8,88

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS

Grafik

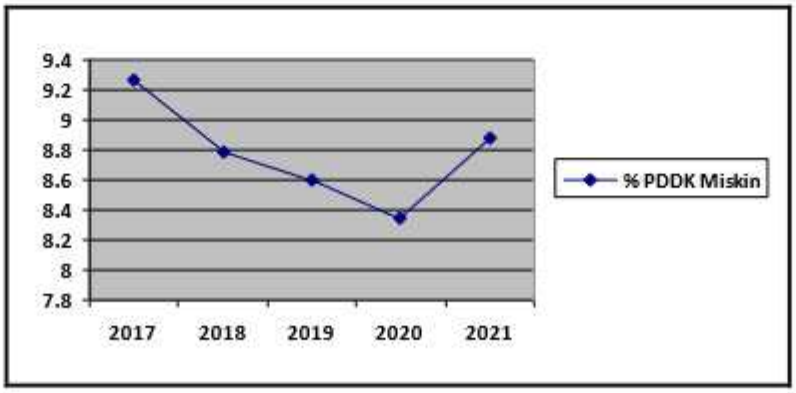

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos Tahun 2021, terdapat 2 kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 0,2907 (Prioritas 1), sebanyak 10 kelurahan (24,39%) masuk prioritas 2, dan 8 kelurahan (19,51%) masuk Prioritas 3. Sebagian besar berada di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 7 kelurahan yaitu Lampe, Dodu, Nungga, Kumbe, Oi Fo'o, Kodo dan Lelamase. Kemudian di Kecamatan Raba sebanyak 5 kecamatan yaitu Nitu, Rontu, Kendo, Penanae dan Ntobo. Kemudian di Kecamatan Mpunda sebanyak 1 kelurahan yaitu sambinae dan Kecamatan Asakota yaitu Jatibaru Timur. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota Bima ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 20 kelurahan tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,2907	2	4,88
2	0,1611	10	24,39
3	0,0954	8	19,51
4	0,0433	13	31,71
5	0,0301	6	14,63
6	< 0,0301	2	4,88

Grafik

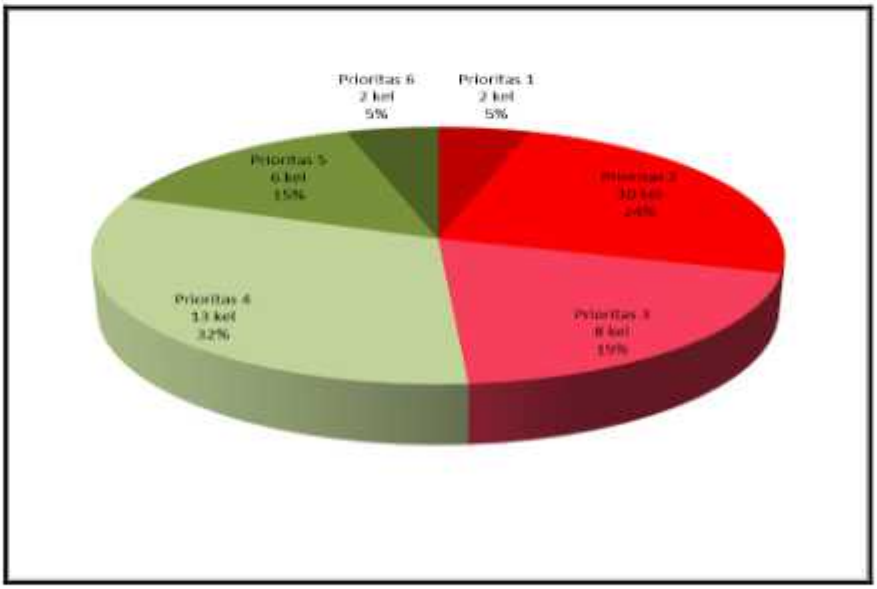

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupaun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021 yang dikeluarkan BPS dan Data dari Dinas Perhubungan dan PUPR Kota Bima bahwa semua kelurahan yang ada di Kota Bima memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepajang tahun.

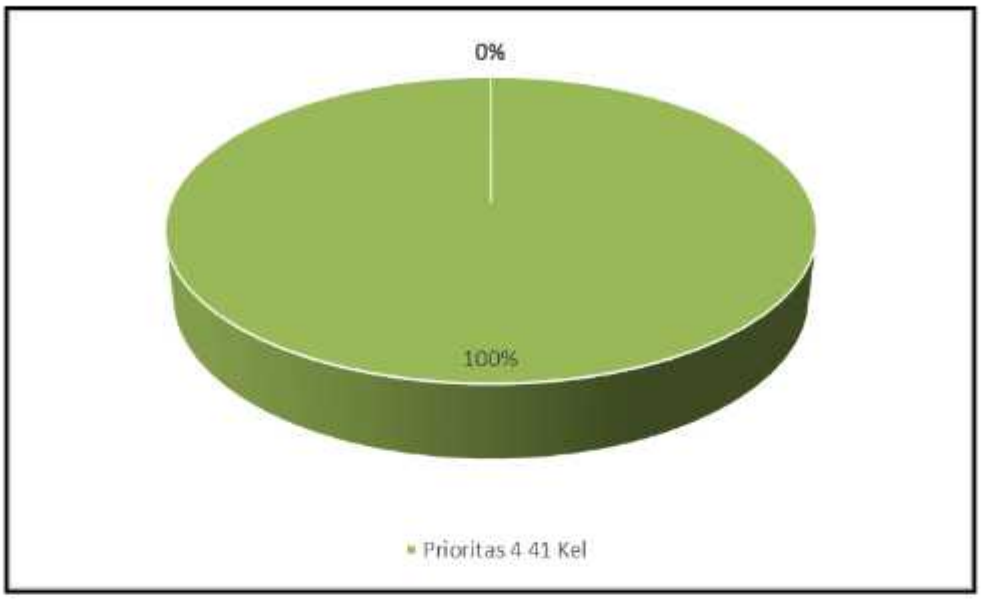

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Bima untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

1. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat kelurahan.
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra agribisnis.
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh.
5. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antar kelurahan.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
BERDASARKAN RASIO JML PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH TERHADAP JML PENDUDUK
KOTA BIMA
TAHUN 2022

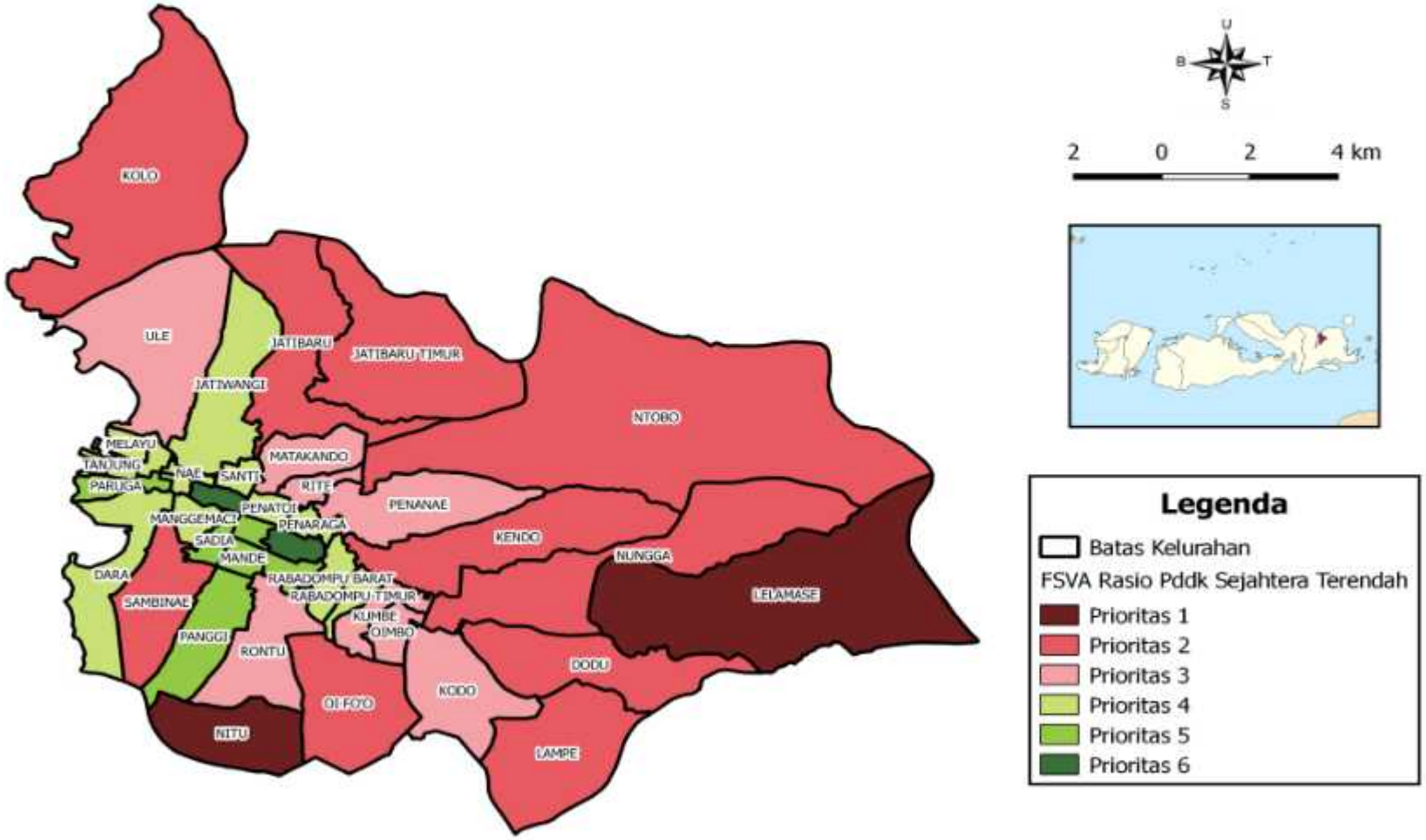

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
BERDASARKAN KELURAHAN YANG TIDAK MEMILIKI AKSES PENGHUBUNG MEMADAI
KOTA BIMA
TAHUN 2022

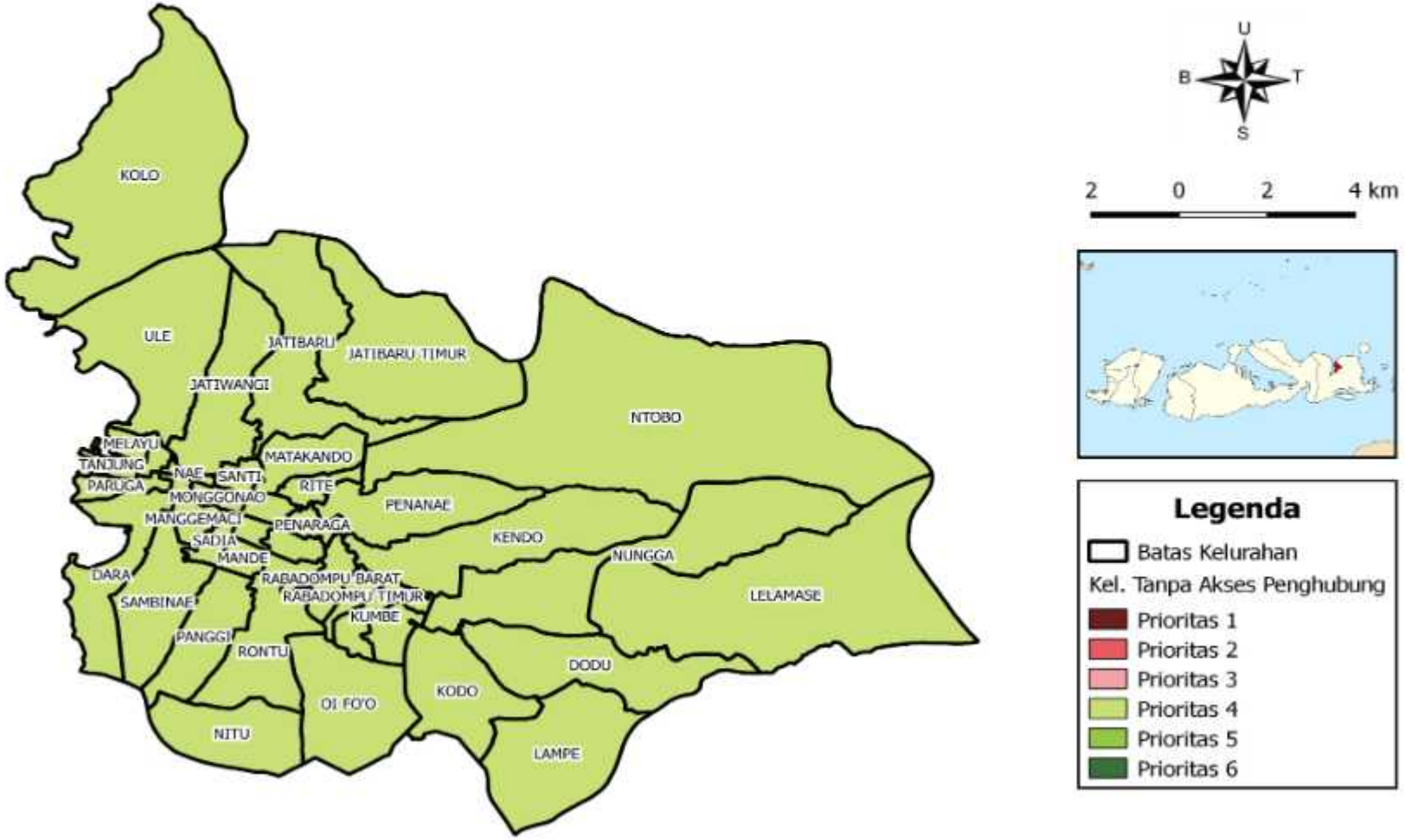

BAB 4
PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota Bima, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut : (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak[1]. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas.

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,0100	9	21,95
2	0,0054	1	2,44
3	0,0018	11	26,83
4	0,0000	8	19,51
5	0,0000	0	00,00
6	<0,0000	12	29,27

Berdasarkan hasil analisis rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga prioritas 1-3 paling banyak berada di Kecamatan Raba sebanyak 6 kelurahan yaitu Nitu, Rontu, Rabangodu Selatan, Kendo, Rite dan Ntobo. Kemudian di Kecamatan Mpunda sebanyak 5 kelurahan yaitu Sambinae, Manggemaci, Monggonao,

[1] Permenkes 416 Tahun 1990

Penatoi dan Santi. Kemudian di Kecamatan Asakota sebanyak 5 kelurahan yaitu Jatiwangi, Jatibaru, Kolo, Ule dan Jatibaru Timur. Selanjutnya di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 4 kelurahan yaitu Paruga, Tanjung, Sarae dan Nae. Dan di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 1 kelurahan yaitu Oi Fo'o.

Grafik

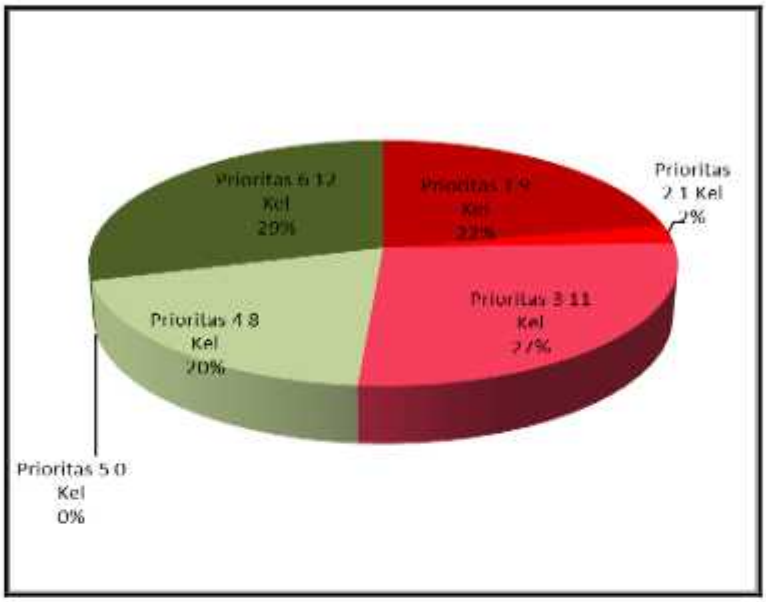

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa indikator rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk untuk prioritas 1-3 paling banyak berada di Kecamatan Rasanae Timu sebanyak 6 kelurahan yaitu Lampe, Dodu, Nungga, Oi Fo'o, Kodo dan Lelamase. Kemudian di Kecamatan Raba sebanyak 5 kelurahan yaitu Nitu, Rontu, Kendo, Penanae dan Ntobo.

Selanjutnya di Kecamatan Asakota sebanyak 4 kelurahan yaitu Jatibaru, Kolo, Ule dan Jatibaru Timur. Di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 1 kelurahan yaitu Dara dan di Kecamatan Mpunda yaitu di kelurahan Sambinae.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	2,0633	2	4,88
2	0,6733	8	19,51
3	0,2050	7	17,07
4	0,0700	5	12,20
5	0,0379	6	14,63
6	<0,0379	13	31,71

Grafik

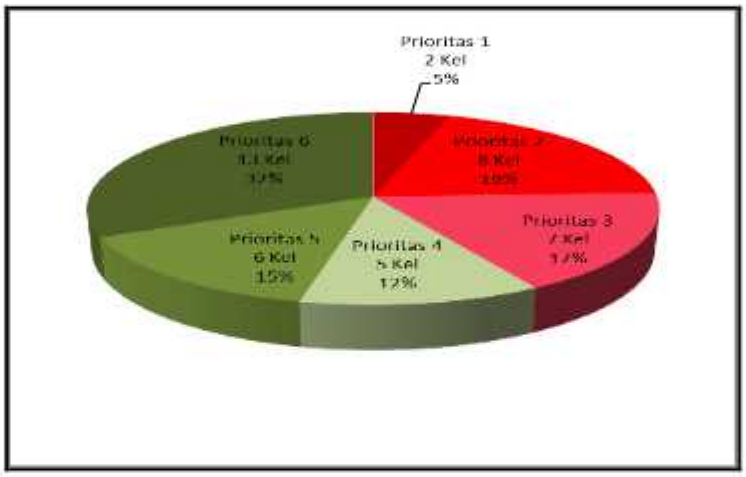

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Menurut Kota Bima Dalam Angka Tahun 2022, bahwa Jumlah penderita gizi buruk di Kota Bima pada tahun 2017-2021 sebanyak 421 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Asakota (273 balita) dan terendah ditemukan di Kecamatan Rasanae Timur (13 balita).

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2017-2021

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rasanae Barat	1	5	1	10	15	32
2	Mpunda	4	3	10	8	28	53
3	Rasanae Timur	3	3	0	1	6	13
4	Raba	1	3	3	6	37	50
5	Asakota	4	1	91	147	30	273
	Total	13	15	105	172	116	421

Grafik Penderita Gizi Buruk

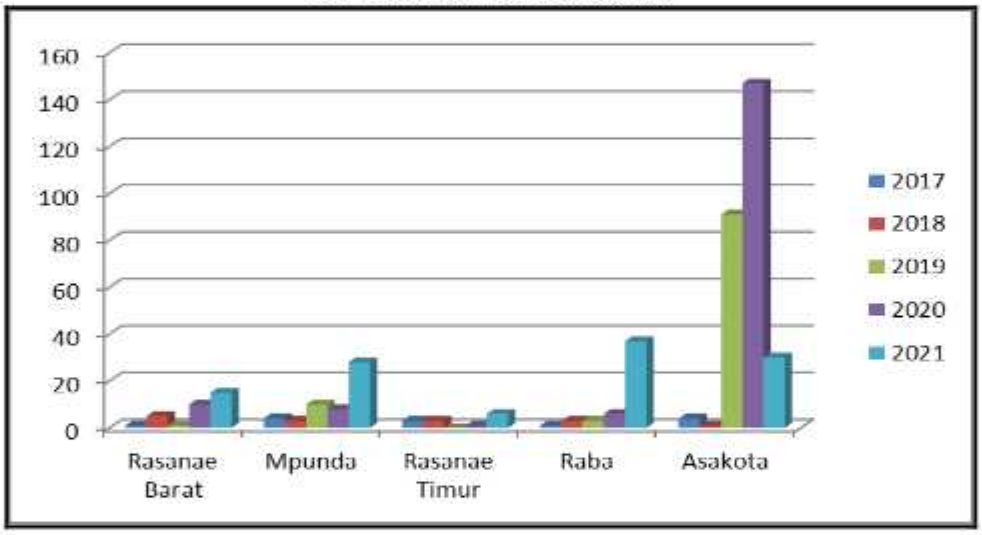

Sedangkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bima, jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan 5 tahun terakhir (2015 s.d 2019) sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Kasus			Perkembangan				
		Sisa Tahun Lalu	Kasus Tahun ini	Total	Menjadi gizi Baik	Menjadi Gizi Kurang	Tetap Gizi Buruk	Meninggal	Pindah
1.	2015	6	11	17	5	3	6	1	2
2.	2016	6	15	21	5	5	7	1	3
3.	2017	10	13	23	4	7	12	0	0
4.	2018	12	5	17	1	5	10	1	0
5.	2019	13	7	20	1	4	12	1	2
	Jumlah	47	51	98	16	24	47	4	7

Grafik

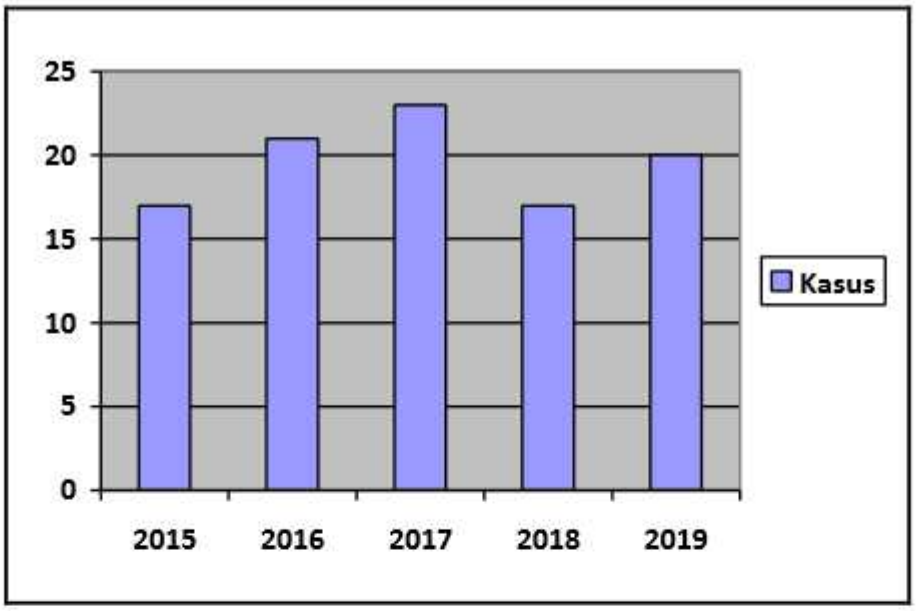

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Bima Tahun 2020 adalah 0,00 jiwa per 1.000 KH. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Bima pada Tahun 2020 adalah 0,00/100.000 Kelahiran Hidup.

Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Jumlah
1	Rasanae Barat	0	0	0
2	Mpunda	1	0	1
3	Rasanae Timur	0	0	0
4	Raba	1	0	1
6	Asakota	0	0	0
	Total	**2**	**0**	**2**

Grafik

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (stunting) menjadi perhatian penting Pemerintah Kota Bima, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
    a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut "jendela peluang (*window of opportunity*)" karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pad anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan an perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
   a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
      - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil zat besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
      - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisiasi menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI ekslusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
      - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
      - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
      - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.

- Memperbaiki asupan gizi mikro : promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil zat besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan).

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

   Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

   Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
BERDASARKAN RASIO RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA
KOTA BIMA
TAHUN 2022

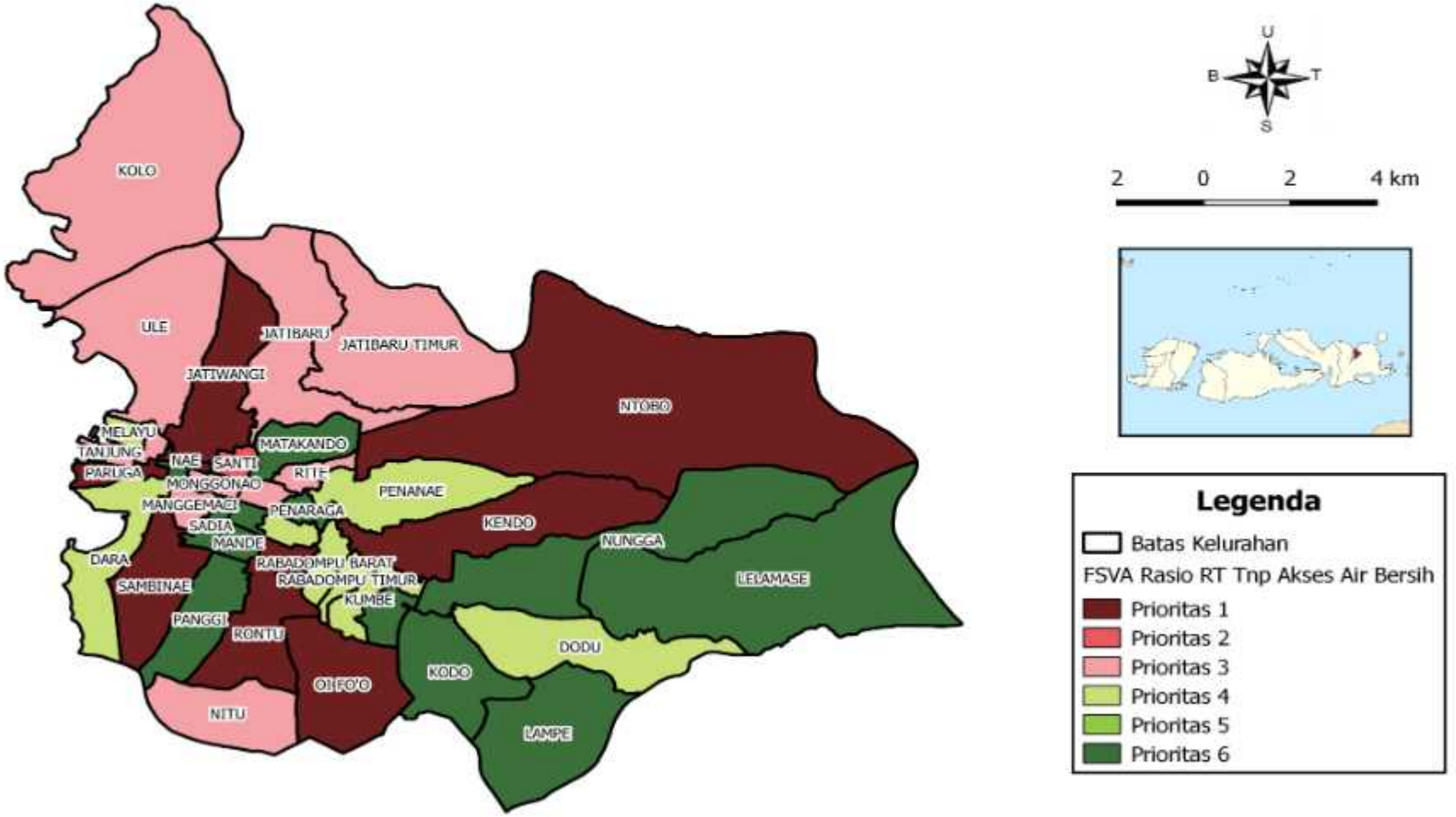

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
BERDASARKAN RASIO JUMLAH PENDUDUK PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK
KOTA BIMA
TAHUN 2022

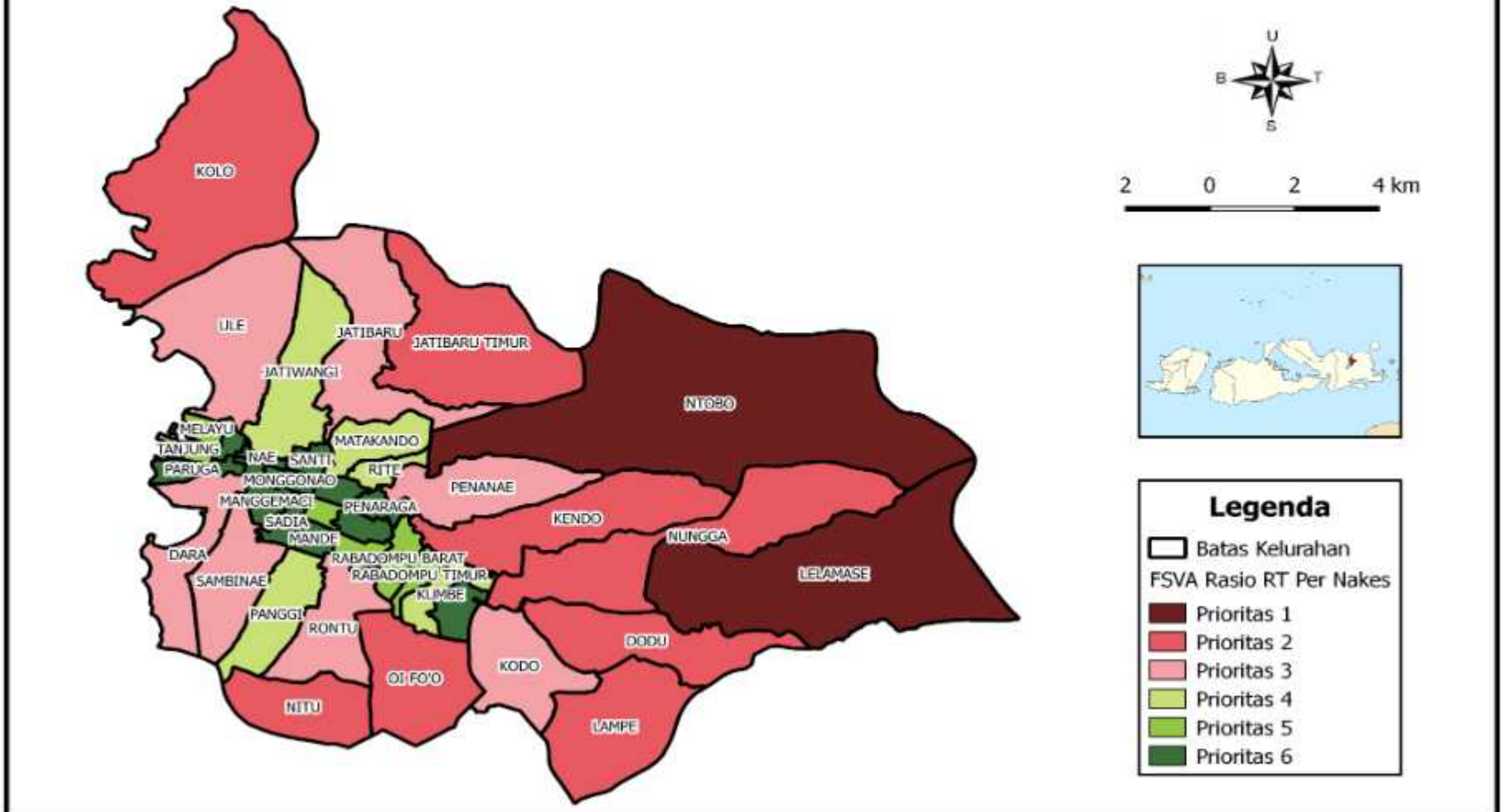

BAB 5
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 41 kelurahan yang ada di Kota Bima maka didapatkan 0 kelurahan (Prioritas 1), 5 kelurahan (Prioritas 2), 7 kelurahan (Prioritas 3), 18 kelurahan (Prioritas 4), 6 kelurahan (Prioritas 5) dan 5 kelurahan (Prioritas 6).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase	Ket (Kelurahan)	
1	**0**	**00,00**	**-**	
2	**5**	**12,20**	**1. Dodu** **2. Lelamase** **3. Nitu**	**4. Kendo** **5. Jatibaru**
3	**7**	**17,07**	**1. Nae** **2. Sambinae** **3. Lampe** **4. Nungga**	**5. Oi Fo'o** **6. Ntobo** **7. Jatibaru Timur**
4	18	43,90	1. Sadia 2. Manggemaci 3. Lewirato 4. Penatoi 5. Santi 6. Matakando	10. Rontu 11. Penaraga 12. Rabadompu Barat 13. Rabadompu Timur 14. Penanae 15. Rite

			7. Kumbe 8. Kodo 9. Oimbo	16. Jatiwangi 17. Kolo 18. Ule
5	6	14,63	1. Paruga 2. Tanjung 3. Dara	4. Panggi 5. Mande 6. Melayu
6	5	12,20	1. Sarae 2. Pane 3. Monggonao	4. Rabangodu Selatan 5. Rabangodu Utara

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Rasanae Timur (2 kelurahan : Dodu dan Lelamase). Kecamatan Raba (2 kelurahan : Nitu dan Kendo), Kecamatan Asakota (1 kelurahan : Jatibaru).

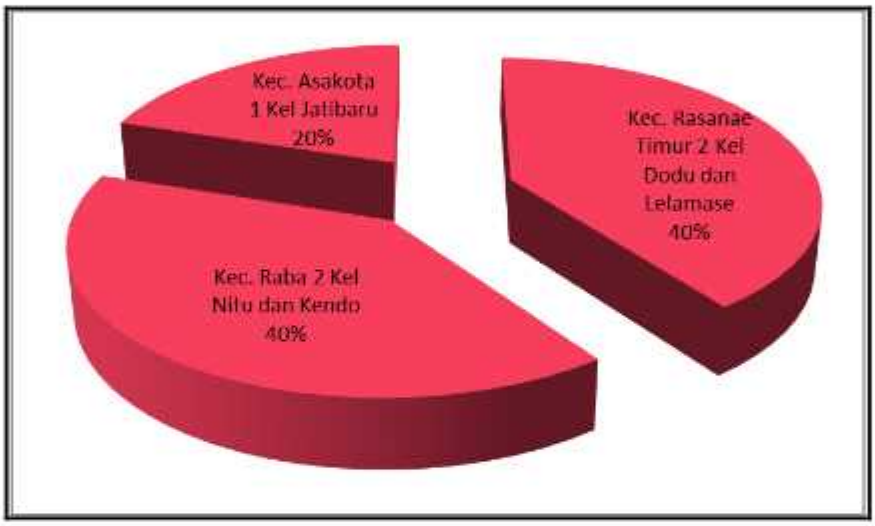

Gambar 5.1 Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 2 Per Kecamatan

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Rasanae Barat (1 kelurahan : Nae), Kecamatan Mpunda (1 kelurahan : Sambinae), Kecamatan Rasanae Timur (3 kelurahan : Lampe, Nungga, Oi Fo'o), Kecamatan Raba (1 kelurahan : Ntobo), Kecamatan Asakota (1 kelurahan : Jatibaru Timur).

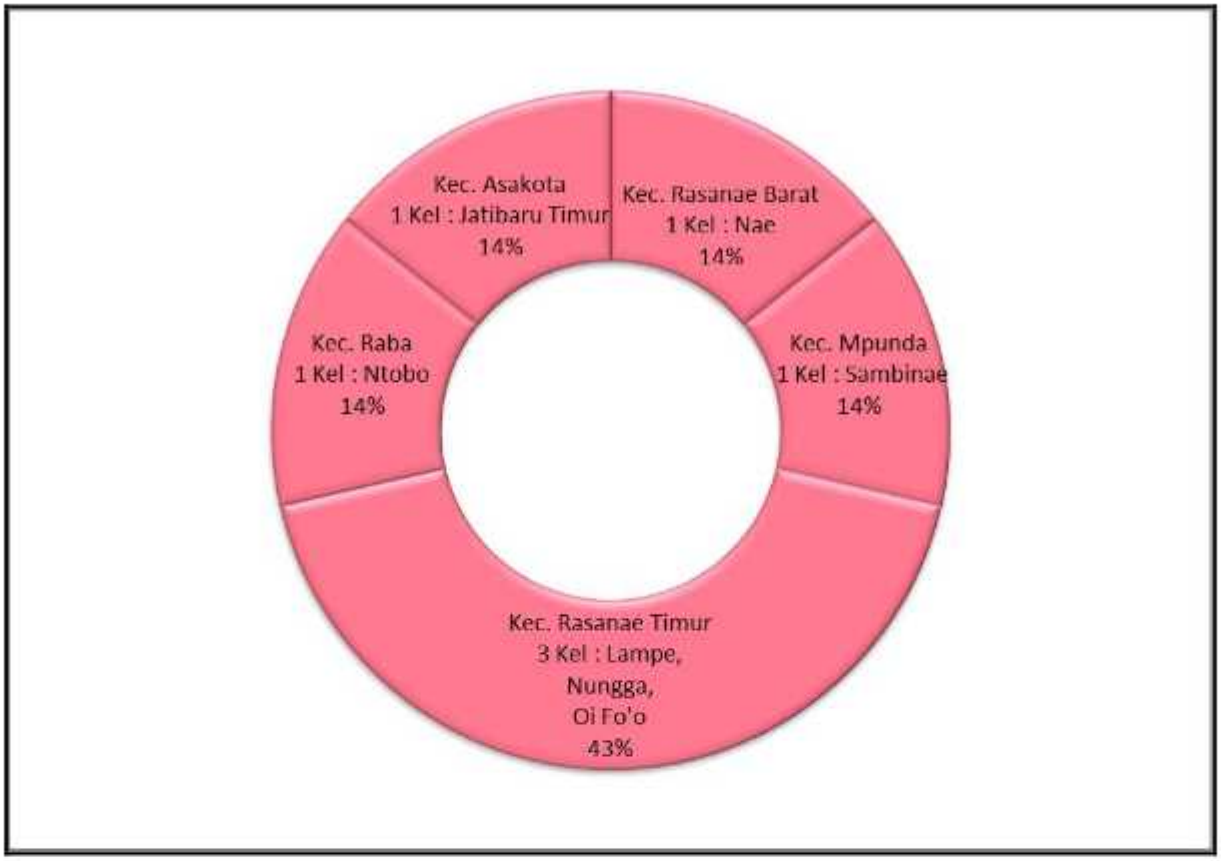

Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 3 per Kecamatan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan secara umum berturut-turut disebabkan oleh : (1) Rasio Sarana Pangan dengan Jumlah Penduduk belum memadai, (2) Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih yang masih cukup tinggi, dan (3) Rasio Jumlah Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumah penduduk.

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 dan 3 secara berturut-turut disebabkan oleh: (1) Rasio Sarana Pangan dengan Jumlah Penduduk belum memadai, (2) Rasio Jumlah Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumah penduduk, dan (3) Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan yang belum memadai.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/FSVA
BERDASARKAN PRIORITAS KOMPOSIT
KOTA BIMA
TAHUN 2022

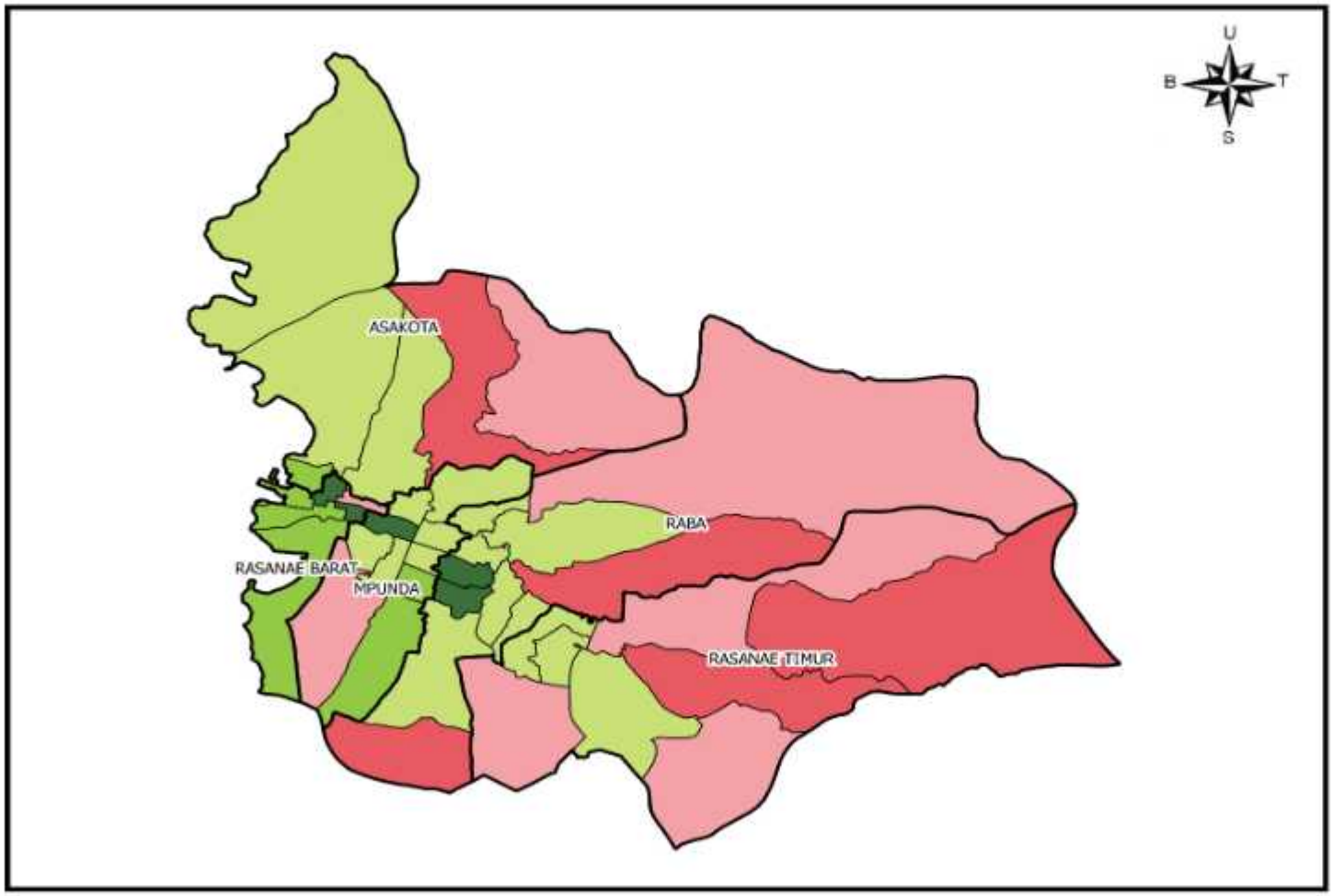

Legenda

- Batas Kecamatan

Kota Bima Komposit

- Kelurahan Prioritas 1
- Kelurahan Prioritas 2
- Kelurahan Prioritas 3
- Kelurahan Prioritas 4
- Kelurahan Prioritas 5
- Kelurahan Prioritas 6

2 0 2 4 km

SUMBER DATA :
1. BPS
2. DINAS PERTANIAN
3. DINAS KESEHATAN
4. DINAS SOSIAL
5. DINAS DUKCAPIL
6. DINAS PUPR
7. DINAS PERHUBUNGAN
8. DINAS DPPKB
9. DINAS KOPERINDAG
10. SIMATIK

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN / FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)
BERDASARKAN PRIORITAS KOMPOSIT
KOTA BIMA
TAHUN 2022

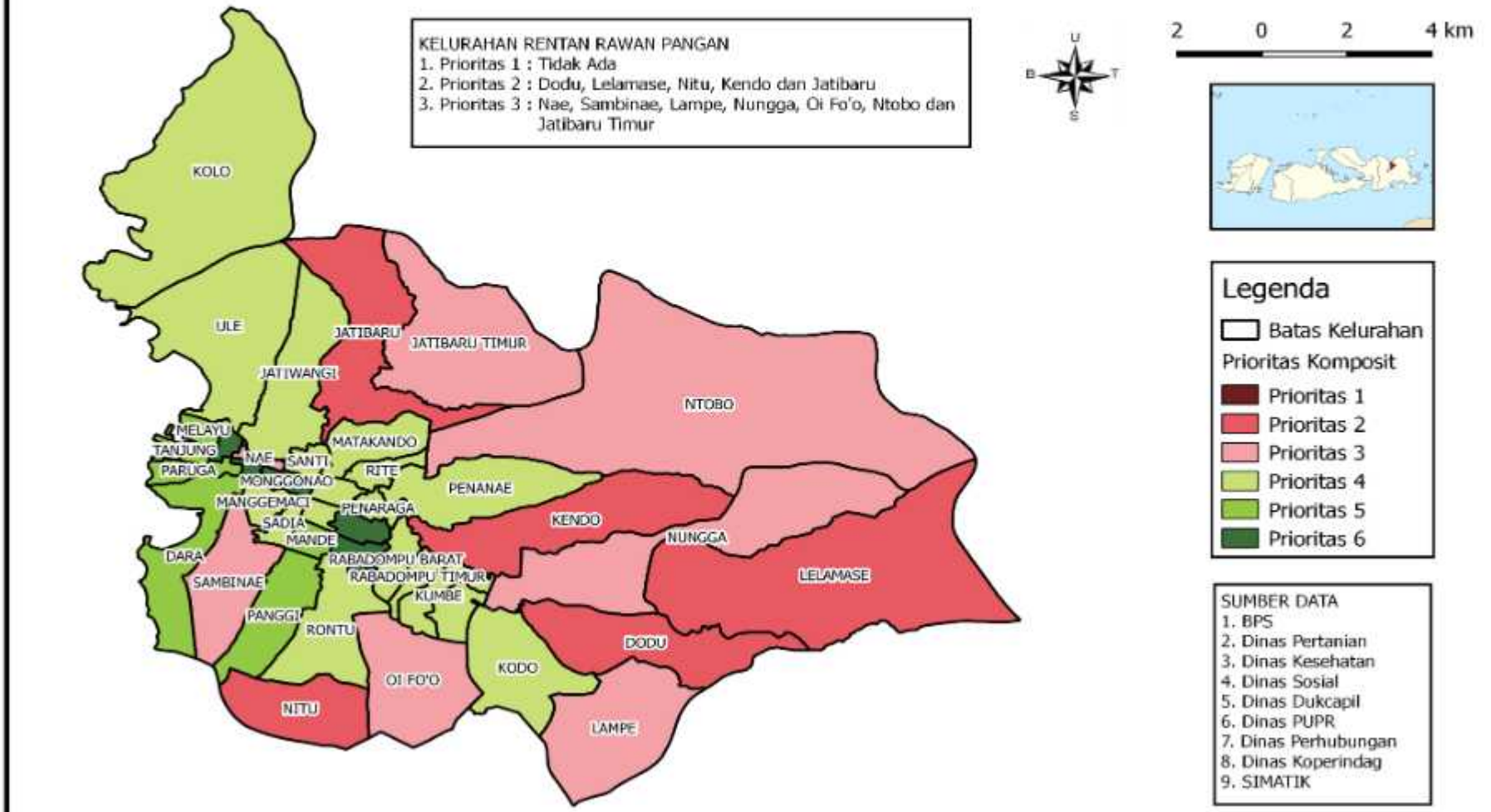

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN BERDASARKAN PRIORITAS KOMPOSIT KOTA BIMA TAHUN 2022

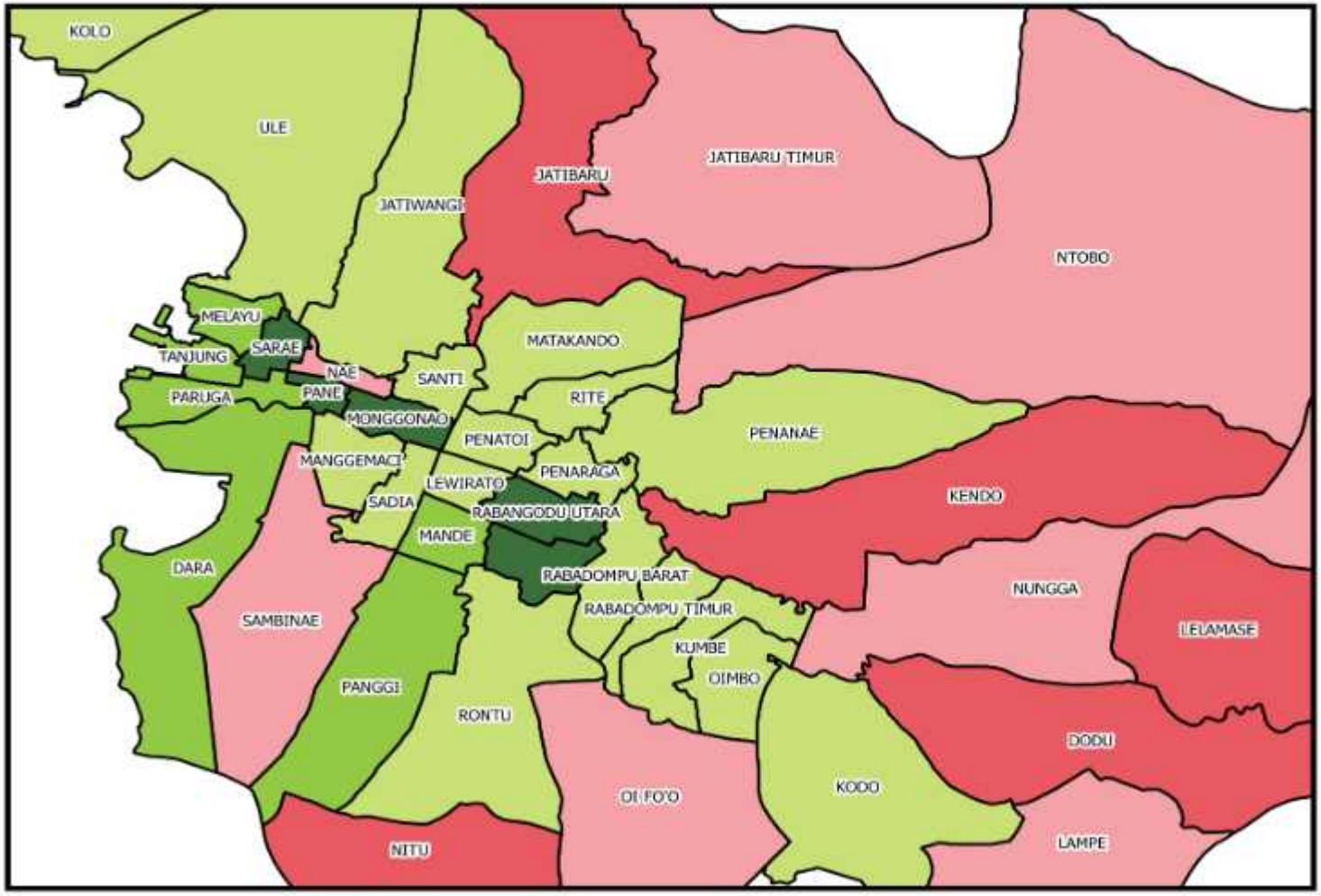

U
B T
S

1 0 1 2 km

Legenda

- Batas Kelurahan

Prioritas Komposit

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

SUMBER DATA :
1. BPS KOTA BIMA
2. DINAS PERTANIAN
3. DINAS SOSIAL
4. DINAS KESEHATAN
5. DINAS DUKCAPIL
6. DINAS PUPR
7. DINAS KOPERINDAG
8. DINAS PERHUBUNGAN
9. DINAS DP2KB
10. SIMATIK KELURAHAN

BAB 6
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan diprioritaskan pada Kelurahan dengan prioritas 2-3 yang tersebar di Kecamatan Rasanae Barat, Mpunda, Rasanae Timur, Raba dan Asakota.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kota Bima diarahkan pada kegiatan :

a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal.
b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, optimasi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan listrik), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah.
c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
d. Penyediaan dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan.

Lampiran 1.

DATA ANALISIS FSVA KOTA BIMA TAHUN 2022

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. Luas Lahan Pertanian (Ha)	2. Jumlah Sarana & Prasarana Penyedia Pangan (Unit)	3. Jumlah Pddk Tingkat Kesejahteraan Terendah (jiwa)	4. Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai	5. Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih	6. Jumlah Tenaga Kesehatan (Orang)	a. Luas Wilayah Desa (Ha)	b. Jumlah Penduduk Desa	c. Jumlah Rumah Tangga
1	RASANAE BARAT	5272010	5272010004	PARUGA	32,00	168	319	1	279	5	91,00	7.460	730
2	RASANAE BARAT	5272010	5272010005	TANJUNG	6,00	155	513	1	2	6	79,00	8.449	696
3	RASANAE BARAT	5272010	5272010006	SARAE	3,00	197	391	1	3	8	48,00	8.697	772
4	RASANAE BARAT	5272010	5272010007	NAE	6,00	85	355	1	110	7	31,00	6.030	1.094
5	RASANAE BARAT	5272010	5272010009	DARA	448,00	277	509	1	2	11	734,00	8.517	1.461
6	RASANAE BARAT	5272010	5272010010	PANE	4,00	108	178	1	0	6	31,00	3.909	700
7	MPUNDA	5272011	5272011001	SAMBINAE	448,20	41	374	1	49	2	543,00	1.985	927
8	MPUNDA	5272011	5272011002	PANGGI	291,68	45	150	1	0	5	351,00	3.617	675
9	MPUNDA	5272011	5272011003	MANDE	45,08	77	239	1	0	1	69,00	5.897	294
10	MPUNDA	5272011	5272011004	SADIA	29,86	50	228	1	0	17	68,00	5.733	738
11	MPUNDA	5272011	5272011005	MANGGEMACI	9,59	85	334	1	6	14	52,00	4.845	992
12	MPUNDA	5272011	5272011006	MONGGONAO	10,60	60	164	1	1	0	63,00	6.865	0
13	MPUNDA	5272011	5272011007	LEWIRATO	10,05	34	92	1	0	4	49,00	2.777	473
14	MPUNDA	5272011	5272011008	PENATOI	12,52	64	268	1	7	0	74,00	5.663	0
15	MPUNDA	5272011	5272011009	SANTI	15,78	37	212	1	6	21	72,00	2.970	747
16	MPUNDA	5272011	5272011010	MATAKANDO	157,00	68	376	1	0	0	187,00	3.212	0
17	RASANAE TIMUR	5272020	5272020001	LAMPE	708,34	18	199	1	0	0	723,00	1.095	0
18	RASANAE TIMUR	5272020	5272020002	DODU	631,87	45	550	1	1	0	793,00	2.177	0
19	RASANAE TIMUR	5272020	5272020003	NUNGGA	1.132,50	20	384	1	0	0	1.159,00	1.554	0
20	RASANAE TIMUR	5272020	5272020004	KUMBE	58,80	58	497	1	1	0	125,00	5.157	0
21	RASANAE TIMUR	5272020	5272020014	OI FO'O	890,00	15	394	1	9	0	920,00	2.163	0
22	RASANAE TIMUR	5272020	5272020015	KODO	531,20	18	251	1	0	0	555,00	1.623	0
23	RASANAE TIMUR	5272020	5272020016	LELAMASE	2.056,00	19	377	1	0	0	2.105,00	1.278	0
24	RASANAE TIMUR	5272020	5272020017	OIMBO	31,00	28	205	1	0	0	27,00	1.918	0
25	RABA	5272021	5272021001	NITU	595,00	16	332	1	1	1	619,00	1.015	409
26	RABA	5272021	5272021002	RONTU	412,02	41	380	1	7	2	474,00	3.704	825
27	RABA	5272021	5272021003	RABANGODU SELATAN	19,19	67	209	1	5	0	144,00	4.837	0
28	RABA	5272021	5272021004	RABANGODU UTARA	24,16	332	181	1	1	0	96,00	6.485	0
29	RABA	5272021	5272021005	PENARAGA	22,33	127	430	1	0	0	71,00	6.170	0
30	RABA	5272021	5272021006	RABADOMPU BARAT	46,69	150	595	1	1	0	166,00	6.789	0
31	RABA	5272021	5272021007	RABADOMPU TIMUR	20,54	66	409	1	1	0	64,00	4.652	0
32	RABA	5272021	5272021008	KENDO	860,37	29	286	1	29	2	908,00	1.044	444
33	RABA	5272021	5272021009	PENANAE	456,97	65	480	1	2	0	534,00	4.911	0
34	RABA	5272021	5272021010	RITE	131,42	63	336	1	3	8	184,00	2.693	671
35	RABA	5272021	5272021011	NTOBO	3.000,76	48	679	1	35	0	3.118,00	2.611	0
36	ASAKOTA	5272030	5272030001	MELAYU	6,00	116	596	1	1	5	76,00	8.487	1.342
37	ASAKOTA	5272030	5272030002	JATIWANGI	1.497,21	221	760	1	116	30	846,00	8.957	1.378
38	ASAKOTA	5272030	5272030003	JATIBARU	241,94	186	999	1	11	6	1.132,00	3.561	1.549
39	ASAKOTA	5272030	5272030004	KOLO	2.616,74	149	971	1	4	3	2.649,00	3.685	588
40	ASAKOTA	5272030	5272030005	ULE	365,00	118	421	1	2	35	1.041,00	3.565	1.434
41	ASAKOTA	5272030	5272030006	JATIBARU TIMUR	1.874,00	55	597	1	8	3	1.456,00	3.065	995

Lampiran 2.

HASIL ANALISIS FSVA KOTA BIMA TAHUN 2022

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	RASANAE BARAT	5272010	5272010004	PARUGA	3	1	5	4	1	1	74,20	7	5
2	RASANAE BARAT	5272010	5272010005	TANJUNG	2	1	4	4	3	5	74,07	8	5
3	RASANAE BARAT	5272010	5272010006	SARAE	2	1	4	4	3	1	75,98	5	1
4	RASANAE BARAT	5272010	5272010007	NAE	2	1	4	4	1	1	60,89	31	3
5	RASANAE BARAT	5272010	5272010009	DARA	1	1	4	4	4	3	70,78	10	5
6	RASANAE BARAT	5272010	5272010010	PANE	2	1	4	4	1	1	82,11	1	1
7	MPUNDA	5272011	5272011001	SAMBINAE	1	1	2	4	1	3	57,99	33	3
8	MPUNDA	5272011	5272011002	PANGGI	1	1	5	4	1	4	74,22	1	5
9	MPUNDA	5272011	5272011003	MANDE	3	1	5	4	1	1	70,79	9	5
10	MPUNDA	5272011	5272011004	SADIA	3	1	5	4	1	1	66,36	17	4
11	MPUNDA	5272011	5272011005	MANGGEMACI	2	3	4	4	3	1	66,33	18	4
12	MPUNDA	5272011	5272011006	MONGGONAO	2	1	1	4	3	1	77,01	3	1
13	MPUNDA	5272011	5272011007	LEWIRATO	2	1	5	4	1	5	66,39	16	4
14	MPUNDA	5272011	5272011008	PENATOI	2	2	4	4	3	1	66,54	15	4
15	MPUNDA	5272011	5272011009	SANTI	3	2	4	4	2	1	65,16	23	4
16	MPUNDA	5272011	5272011010	MATAKANDO	1	5	3	4	1	4	65,66	20	4
17	RASANAE TIMUR	5272020	5272020001	LAMPE	1	1	2	4	1	2	57,35	34	3
18	RASANAE TIMUR	5272020	5272020002	DODU	1	1	2	4	4	2	49,68	41	2
19	RASANAE TIMUR	5272020	5272020003	NUNGGA	1	2	2	4	1	2	55,56	36	3
20	RASANAE TIMUR	5272020	5272020004	KUMBE	4	2	3	4	4	4	63,83	28	4
21	RASANAE TIMUR	5272020	5272020014	OI FO'O	1	1	2	4	1	2	58,12	32	3
22	RASANAE TIMUR	5272020	5272020015	KODO	1	2	3	4	1	3	63,23	29	4
23	RASANAE TIMUR	5272020	5272020016	LELAMASE	1	1	1	4	1	1	51,92	40	2
24	RASANAE TIMUR	5272020	5272020017	OIMBO	4	4	3	4	1	1	65,05	24	4
25	RABA	5272021	5272021001	NITU	1	2	1	4	3	2	52,51	39	2
26	RABA	5272021	5272021002	RONTU	1	3	3	4	1	3	64,05	27	4
27	RABA	5272021	5272021003	RABANGODU SELATAN	2	1	5	4	1	5	76,90	4	1
28	RABA	5272021	5272021004	RABANGODU UTARA	2	1	1	4	4	1	75,66	2	1
29	RABA	5272021	5272021005	PENARAGA	2	4	4	4	1	1	67,51	12	4
30	RABA	5272021	5272021006	RABADOMPU BARAT	3	5	4	4	4	5	66,91	13	4
31	RABA	5272021	5272021007	RABADOMPU TIMUR	3	3	4	4	4	5	65,26	22	4
32	RABA	5272021	5272021008	KENDO	1	1	2	4	1	2	54,72	38	2
33	RABA	5272021	5272021009	PENANAE	1	3	3	4	4	3	64,37	26	4
34	RABA	5272021	5272021010	RITE	5	5	3	4	3	4	64,99	25	4
35	RABA	5272021	5272021011	NTOBO	1	2	2	4	1	1	55,87	35	3
36	ASAKOTA	5272030	5272030001	MELAYU	2	1	4	4	4	5	70,62	11	5
37	ASAKOTA	5272030	5272030002	JATIWANGI	1	1	4	4	1	4	66,15	19	4
38	ASAKOTA	5272030	5272030003	JATIBARU	1	5	2	4	3	3	54,95	37	2
39	ASAKOTA	5272030	5272030004	KOLO	1	1	2	4	3	2	65,43	21	4
40	ASAKOTA	5272030	5272030005	ULE	1	1	3	4	3	3	66,58	14	4
41	ASAKOTA	5272030	5272030006	JATIBARU TIMUR	1	2	2	4	3	2	60,95	30	3

Lampiran 3.

JUMLAH DAN PERSENTASE PRIORITAS KOMPOSIT

1. Jumlah Kelurahan di Masing-masing Prioritas Komposit

Prioritas Komposit	Jumlah Kelurahan
1	0
2	5
3	7
4	18
5	6
6	5
Total	**41**

2. Persentase Kelurahan di Masing-masing Prioritas Komposit

Prioritas Komposit	Persentase Kelurahan
1	00,00%
2	12,20%
3	17,07%
4	43,90%
5	14,63%
6	12,20%
Total	**100,00%**

3. Jumlah Kelurahan per Prioritas Komposit di Masing-masing Kecamatan

Jumlah Kelurahan	Prioritas Komposit					
Nama Kecamatan	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**Total**
RASANAE BARAT		1		3	2	6
MPUNDA		1	6	2	1	10
RASANAE TIMUR	2	3	3			8
RABA	2	1	6		2	11
ASAKOTA	1	1	3	1		6
Total	**5**	**7**	**18**	**6**	**5**	**41**

Lampiran 4.

FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP RAWAN PANGAN

FAKTOR YANG BERPENGARUH SECARA UMUM	
PRIORITAS KOMPOSIT	(All)
Values	
Sum of 1. Bobot Rasio Lahan	30
Sum of 2. Bobot Rasio Sarana	44
Sum of 3. Bobot Rasio Pddk Tidak Sejahtera	34
Sum of 4. Bobot Akses Jalan	0
Sum of 5. Bobot Rasio Tanpa Air Bersih	40
Sum of 6. Bobot Rasio Pddk per Tenkes per Density	29

FAKTOR YANG BERPENGARUH DI DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	
PRIORITAS KOMPOSIT	(Multiple Items)
Values	
Sum of 1. Bobot Rasio Lahan	2
Sum of 2. Bobot Rasio Sarana	26
Sum of 3. Bobot Rasio Pddk Tidak Sejahtera	24
Sum of 4. Bobot Akses Jalan	0
Sum of 5. Bobot Rasio Tanpa Air Bersih	18
Sum of 6. Bobot Rasio Pddk per Tenkes per Density	22